

Keserakahan Imperial atas Energi

Nicolás Maduro telah lama berargumen bahwa penderitaan Venezuela dan perjuangan Palestina bukanlah tragedi yang terpisah, melainkan manifestasi dari kejahatan global yang sama: dominasi imperial yang didorong oleh kelaparan energi yang tak terpuaskan. Dalam pidato demi pidato, Maduro mengutuk apa yang ia gambarkan sebagai nasib bersama yang dipaksakan oleh agresi yang didukung AS—di mana rakyat berdaulat dirampas otonominya, dikenai blokade, dan dihukum karena memiliki sumber daya yang diidamkan oleh kekuatan global. Sejarah kini telah membenarkan peringatannya. Venezuela dan Palestina berdiri sebagai korban paralel dari pengejaran predatoris Amerika terhadap bahan bakar fosil—minyak, gas, dan pengendalian energi dengan segala cara.

Venezuela dan Palestina: Front Anti-Imperialisme Bersama

Penjajaran Venezuela dengan Palestina bukanlah teater retorika atau oportunisme diplomatik. Itu adalah pilar dasar Chavismo, diwarisi dari Hugo Chávez dan dipertahankan di bawah Maduro. Sejak menjabat pada 2013, Maduro secara konsisten membingkai pendudukan Palestina sebagai tak terpisahkan dari pengepungan Venezuela sendiri di bawah sanksi dan paksaan. Venezuela memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel pada 2009, memberikan bantuan kemanusiaan selama krisis Gaza berulang, dan mengutuk tindakan Israel sebagai kejahatan yang dimungkinkan oleh kekuatan AS.

Maduro berulang kali menggambarkan Gaza sebagai laboratorium hukuman kolektif—yang dicerminkan, katanya, oleh pengekikan ekonomi yang dikenakan pada Venezuela melalui sanksi AS. Ia menuduh Washington dan sekutunya memungkinan “genosida” di Gaza sambil melakukan “terorisme ekonomi” terhadap Caracas. Dalam pidato tahun 2024, ia menyatakan perjuangan Palestina sebagai “penyebab paling suci umat manusia,” secara eksplisit menghubungkannya dengan perlawanan Venezuela terhadap upaya AS untuk merebut kendali atas kekayaan minyaknya.

Peringatan-peringatan ini dianggap oleh kritikus sebagai postur ideologis. Namun, peristiwa sejak itu telah membuatnya menjadi prediksi yang mengerikan. Maduro berargumen bahwa negara-negara kaya sumber daya tidak hanya ditekan, tetapi ditargetkan—melalui sanksi, konflik proksi, dan kekuatan langsung—hingga rezim yang patuh dipasang. Di Palestina, ia menunjuk blokade Israel atas Gaza sebagai strategi yang disengaja untuk menyangkal kendali Palestina atas sumber daya alam mereka sendiri, termasuk ladang gas Gaza Marine. Di Venezuela, logika yang sama berlaku untuk minyak. Karena bahan bakar fosil tetap sentral bagi kekuatan geopolitik meskipun retorika transisi energi, intervensi AS telah meningkat, mengubah analisis Maduro menjadi realitas yang dijalani.

Venezuela: Dihukum karena Melindungi Minyaknya

Kekayaan alam Venezuela yang luas telah lama menandainya untuk predasi asing. Dengan lebih dari 300 miliar barel cadangan minyak terbukti—terbesar di dunia—yang terkonsentrasi sebagian besar di Sabuk Orinoco, negara ini mewakili hadiah yang terlalu berharga untuk diabaikan oleh kekuatan haus energi. Di bawah Maduro, perusahaan minyak negara PDVSA menolak dominasi korporat AS, malah bermitra dengan Rusia, China, dan Iran untuk mengembangkan proyek seperti Carabobo dan Junín.

Responsnya adalah perang ekonomi. Mulai tahun 2017, sanksi AS secara sistematis melumpuhkan ekonomi Venezuela, memangkas produksi minyak dari sekitar 2,5 juta barel per hari menjadi di bawah satu juta. Maduro secara konsisten menggambarkan sanksi ini bukan sebagai alat promosi demokrasi, melainkan sebagai instrumen pencurian—dirancang untuk memaksa Venezuela tunduk dan membuka ladang minyaknya untuk kendali AS.

Tujuan itu menjadi eksplisit pada 5 Januari 2026, ketika serangan militer AS menghantam Caracas dan Nicolás Maduro ditangkap. Presiden Trump membenarkan operasi itu sebagai kampanye melawan “narco-terorisme,” tetapi kata-katanya sendiri menghilangkan segala pretensi. Berbicara di Mar-a-Lago, Trump mengumumkan: “Kami akan menjalankan negara itu sampai saat kami bisa melakukan transisi yang aman, tepat, dan bijaksana.” Ia menekankan bahwa administrasi AS atas Venezuela “tidak akan membebani kita sedikit pun,” karena pendapatan minyak—“uang yang keluar dari tanah”—akan membiayai upaya Amerika.

Ini bukan anomali. Itu mengikuti skrip imperial yang familiar, menggemakan Irak dan Libya, di mana perubahan rezim membuka jalan bagi akses energi. Penghapusan Maduro, yang dikutuk secara internasional sebagai tindakan agresi, mengonfirmasi apa yang telah ia peringatkan selama bertahun-tahun: minyak Venezuela membuatnya menjadi target. Fiksasi Trump yang tanpa penyesalan pada ekstraksi sumber daya mengungkap intervensi itu sebagai apa adanya—perebutan energi yang disamarkan sebagai kebijakan keamanan.

Gaza Marine: Masa Depan Palestina yang Dicuri

Pengalaman Palestina mengikuti logika yang sama. Pada tahun 2000, ladang gas Gaza Marine ditemukan sekitar 36 kilometer lepas pantai, mengandung perkiraan satu triliun kaki kubik gas alam. Meskipun sederhana menurut standar global, ladang ini mewakili penyelamat bagi kemandirian energi Palestina. Terletak di zona maritim Palestina di bawah UNCLOS, Gaza Marine seharusnya mengubah ekonomi Gaza.

Sebaliknya, pengembangannya dicekik. Pembatasan Israel, kendali militer, dan pendudukan yang berkelanjutan mencegah Palestina mengakses sumber daya mereka sendiri. Para pendukung berargumen bahwa blokade Israel dan kampanye militer berulang—didukung secara diplomatik dan militer oleh Amerika Serikat—bukan hanya untuk tujuan keamanan, tetapi juga ekonomi: menyangkal kedaulatan Palestina atas kekayaan alam mereka.

Sejak perang Oktober 2023, kekhawatiran ini semakin intens. Tuduhan semakin meningkat bahwa pengusiran massal di Gaza bisa memfasilitasi eksploitasi Israel atas Gaza Marine, mengintegrasikannya ke jaringan energi regional dengan dukungan AS. Penerbitan lisensi eksplorasi Israel di perairan adjacent pada 2023, dikombinasikan dengan kesepakatan ekspor gas senilai \$35 miliar dengan Mesir, telah memicu klaim pencurian sumber daya yang disengaja. Sepanjang proses ini, AS telah melindungi Israel secara diplomatik, memveto resolusi PBB dan memprioritaskan keamanan energi di Cekungan Levant daripada hak Palestina.

Paralel dengan Venezuela tak terbantahkan. Dalam kedua kasus, sanksi, blokade, dan kekuatan mencegah populasi lokal mendapatkan manfaat dari sumber daya mereka sendiri, sementara kekuatan eksternal memposisikan diri untuk untung.

Hukum yang Hancur

Intervensi AS di Venezuela dan pernyataan Trump sendiri menimbulkan konsekuensi hukum serius di bawah hukum internasional dan domestik.

Venezuela di Bawah Pendudukan

Dengan secara terbuka menyatakan bahwa AS akan “menjalankan” Venezuela selama periode transisi, Trump menetapkan kondisi hukum pendudukan. Di bawah Pasal 42 Peraturan Den Haag 1907, pendudukan ada ketika wilayah ditempatkan di bawah otoritas tentara musuh yang menjalankan kendali efektif. Operasi 5 Januari 2026—menggabungkan serangan militer dengan penghapusan paksa kepala negara Venezuela—memenuhi definisi ini, memicu kewajiban di bawah Konvensi Jenewa.

Hukum internasional tegas: kekuatan pendudukan tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan sendiri. Pasal 55 Peraturan Den Haag membatasi penduduk pada usufruct—administrasi sementara tanpa pengurusan sumber daya tak terbarukan. Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat secara eksplisit melarang penjarahan, mengklasifikasikan eksploitasi semacam itu sebagai kejahatan perang di bawah Statuta Roma. Janji Trump bahwa perusahaan minyak AS akan untung dari minyak Venezuela, dan bahwa pendapatan akan membiayai biaya Amerika, menandakan niat jelas untuk melanggar larangan ini.

Penculikan Kepala Negara

Penangkapan Nicolás Maduro memperburuk pelanggaran ini. Hukum internasional adat, yang ditegaskan oleh Mahkamah Internasional dalam kasus *Arrest Warrant* (2002), memberikan kekebalan mutlak kepada kepala negara yang sedang menjabat dari yurisdiksi pidana asing. Menghapus Maduro secara paksa tanpa persetujuan atau ekstradisi melanggar Pasal 2(4) Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekuatan terhadap kedaulatan negara. Para ahli hukum memperingatkan bahwa tindakan ini mengundang tanggung jawab negara, reparasi, dan pengawasan di bawah Mahkamah Pidana Internasional, sambil menetapkan preseden yang mengikis norma diplomatik secara global.

Hukum AS Diabaikan

Secara domestik, intervensi ini bertentangan dengan Resolusi Kekuasaan Perang 1973. Presiden hanya boleh memasukkan pasukan AS ke dalam permusuhan dengan otorisasi kongres atau sebagai respons terhadap darurat nasional yang disebabkan oleh serangan terhadap Amerika Serikat. Pembeneran Trump atas “narco-terorisme” tidak memenuhi standar ini. Tidak ada serangan bersenjata yang akan segera terjadi. Operasi itu karena itu merupakan inisiasi permusuhan yang melanggar hukum, melewati Kongres dan menggemakan kontroversi seputar intervensi sebelumnya seperti Libya pada 2011.

Palestina dan Venezuela: Kejahatan yang Sama, Nama yang Berbeda

Pelanggaran ini mencerminkan eksploitasi sumber daya Palestina yang telah lama dilakukan Israel. Di Tepi Barat, Israel mengalihkan perkiraan 80% air akuifer bersama untuk pemukiman dan penggunaan domestik, sangat membatasi akses Palestina—pelanggaran lain terhadap hukum pendudukan. Di Gaza, penghalangan Israel atas kendali Palestina atas gas alam, dikombinasikan dengan kesepakatan ekspor senilai \$35 miliar dengan Mesir yang ditandatangani pada Desember 2025, memperkuat dominasi ekonomi sementara Palestina tetap terampas.

Seperti di Venezuela, pendudukan berlanjut bukan hanya untuk keamanan, tetapi untuk keuntungan.

Kesimpulan

Penghubungan Maduro antara Venezuela dan Palestina bukanlah exaggerasi atau propaganda—itu adalah diagnosis. Kedua masyarakat, yang dikaruniai bahan bakar fosil berharga, telah dihukum karena menegaskan kedaulatan. Kedua-duanya telah menghadapi blokade, sanksi, dan kekuatan militer yang dirancang untuk mematahkan perlawanan dan memfasilitasi ekstraksi sumber daya. Selama minyak dan gas menjadi dasar kekuatan global, keserakahan imperial akan terus menyamar sebagai intervensi kemanusiaan.

Keadilan menuntut lebih dari retorika. Itu memerlukan mengakhiri pendudukan, memulihkan kedaulatan sumber daya, dan menghadapi imperialisme energi yang mendorong konflik modern. Maduro mungkin telah dibungkam, tetapi kebenaran yang ia ungkapkan bertahan—dan begitu juga perjuangan bersama yang ia namai.